Volume 4 Nomor 2 Oktober 2026
https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/alitimad/index
DOI : 10.35878/alitimad.v4i2.2331
e-ISSN: 2987-3886
ISSN: 2987-3886

Antara Mimbar dan Pemberontakan: Peran Ulama dalam Mobilisasi Gerakan Sosial Keagamaan pada Pemberontakan Petani Banten 1888

Dani Wardani[1], Dadan Rusmana[2]
[1,2] UIN Sunan Gunung Djati Bandung
[1]dani.wardani@uinsgd.ac.id, [2]dadan.rusmana@uinsgd.ac.id

OPEN ACCESS

Dikirim : 22 Juni 2026
Diterima : 29 Oktober 2026
Terbit : 31 Oktober 2026
Koresponden:
dani.wardani@uinsgd.ac.id

Cara sitasi: Wardana, D., & Rusmana, D. (2026). Antara Mimbar dan Pemberontakan: Peran Ulama dalam Mobilisasi Gerakan Sosial Keagamaan pada Pemberontakan Petani Banten 1888. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, 4*(2), 157-170.

Karya ini bekerja di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Abstract

The 1888 Banten Peasants' Revolt is commonly understood as a response to Dutch colonial economic and political pressure, yet previous studies have not specifically positioned the ulama as primary actors in its mobilization process. This study aims to explain the socio-religious conditions of Banten society before 1888, analyze the ulama's positions of authority, examine their role in mobilizing the movement, and explain religion's function as legitimation for resistance against colonialism. The study employs the historical method through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, drawing on Sartono Kartodirdjo's work as a primary source alongside literature on Nusantara ulama networks and social movement theory as analytical frameworks. The findings show that the ulama functioned as structural mediators linking socio-economic pressures, pesantren and tarekat networks, and the ideological framework of jihad and Perang Sabil, thereby converting material grievances into organized, spiritually meaningful collective action. The study concludes that traditional religious authority, often regarded as conservative, can instead become a transformative force in shaping resistance against oppressive power, with implications for understanding the relationship between religion, authority, and social mobilization in the history of Islamic resistance in Indonesia.

Keywords: *Ulama; Religious Social Movement; Collective Mobilization; 1888 Banten Revolt; Colonialism.*

Abstrak

Pemberontakan Petani Banten 1888 umumnya dipahami sebagai respons atas tekanan ekonomi dan politik kolonial Belanda, namun kajian terdahulu belum secara khusus memposisikan ulama sebagai aktor utama dalam proses mobilisasinya. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kondisi sosial-keagamaan masyarakat Banten sebelum 1888, menganalisis posisi otoritas ulama, mengkaji peran mereka dalam mobilisasi gerakan, serta menjelaskan fungsi agama sebagai legitimasi perlawanan terhadap kolonialisme. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan merujuk pada karya Sartono Kartodirdjo sebagai sumber primer serta literatur jaringan ulama Nusantara dan teori gerakan sosial sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama berfungsi sebagai mediator struktural yang menghubungkan tekanan sosial-ekonomi, jaringan pesantren dan tarekat, serta kerangka ideologis jihad dan Perang Sabil, sehingga mengonversi keresahan material masyarakat menjadi tindakan kolektif yang terorganisasi dan bermakna spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otoritas keagamaan tradisional, yang sering dipandang konservatif, justru dapat menjadi kekuatan transformatif dalam membentuk resistensi terhadap kekuasaan yang menindas, dan temuan ini relevan bagi pemahaman relasi agama, otoritas, dan mobilisasi sosial dalam sejarah perlawanan Islam di Indonesia.
Kata Kunci : Ulama; Gerakan Sosial Keagamaan; Mobilisasi Kolektif; Pemberontakan Banten 1888; Kolonialisme.

A. PENDAHULUAN

Gerakan sosial yang lahir dari rahim agama merupakan fenomena yang berulang dalam sejarah perlawanan masyarakat terjajah di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Agama, dalam banyak peristiwa historis, tidak sekadar berfungsi sebagai sistem keyakinan privat, melainkan bertransformasi menjadi kekuatan kolektif yang menggerakkan massa untuk melawan struktur kekuasaan yang dipandang menindas (Tarrow, 2011; Tilly dkk., 2019). Di Nusantara, dinamika semacam ini tampak jelas pada akhir abad ke-19, ketika penetrasi kolonialisme Belanda yang semakin intensif ke dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial masyarakat pribumi memunculkan berbagai bentuk resistensi yang berbasiskan identitas keislaman. Salah satu

peristiwa yang paling representatif dari fenomena tersebut adalah Pemberontakan Petani Banten tahun 1888, sebuah gerakan perlawanan yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ledakan kemarahan sosial akibat tekanan ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi gerakan sosial keagamaan yang dibangun melalui jaringan, simbol, dan otoritas religius.

Kajian mengenai Pemberontakan Banten 1888 telah memiliki tradisi keilmuan yang cukup mapan. Kartodirdjo (Kartodirdjo, 1984), melalui karya monumentalnya, menempatkan peristiwa ini sebagai studi kasus penting gerakan sosial dalam sejarah Indonesia dengan menyoroti tekanan kolonial, struktur sosial pedesaan, serta unsur milenarianisme Islam sebagai faktor pembentuk gerakan. Pada jalur yang berbeda, Azra (Azra, 2013) menekankan signifikansi jaringan ulama Nusantara–Timur Tengah sebagai medium transmisi pengetahuan keagamaan sekaligus pembentuk otoritas sosial dalam masyarakat Muslim. Kedua arus kajian ini saling melengkapi: yang satu menjelaskan kondisi struktural yang melahirkan pemberontakan, yang lain menjelaskan basis intelektual-spiritual yang menopang otoritas keagamaan. Namun, jika kedua tradisi tersebut dibaca bersama, terlihat satu kecenderungan yang sama—ulama hadir sebagai bagian dari latar religius peristiwa, namun belum diposisikan secara eksplisit sebagai aktor sosial yang aktif mengonversi otoritas moral dan jaringan keagamaannya menjadi mekanisme mobilisasi kolektif yang terorganisasi.

Kesenjangan ini menjadi semakin relevan untuk diisi apabila ditinjau dari perkembangan teori gerakan sosial kontemporer. Tilly dkk. (Tilly dkk., 2019) dan Tarrow (Tarrow, 2011), melalui kerangka *contentious politics*, menegaskan bahwa gerakan sosial muncul dari kombinasi keluhan kolektif, peluang politik, struktur organisasi, dan kapasitas mobilisasi. Sementara itu, perspektif sosiologi agama yang dikembangkan Berger dan Luckmann (1967) menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai *sacred canopy*—sistem makna sakral yang melegitimasi tindakan sosial dan memberi arah moral pada aksi kolektif. Apabila kedua kerangka ini disandingkan dengan temuan historiografis Kartodirdjo (Kartodirdjo, 1984) dan Azra (Azra, 2013), tampak jelas bahwa ulama dalam

masyarakat Banten abad ke-19 sesungguhnya memenuhi hampir seluruh prasyarat teoritis sebagai aktor pemobilisasi: otoritas moral, legitimasi religius, jaringan pesantren-tarekat, serta kapasitas menyebarkan gagasan melalui forum keagamaan (van Bruinessen, 1999). Sayangnya, potensi analitis ini belum dieksplorasi secara khusus dalam kajian-kajian terdahulu mengenai Pemberontakan Banten 1888, sehingga peran ulama sebagai *penghubung* antara keresahan sosial dan narasi keagamaan—bukan sekadar simbol religius pemberontakan—masih menyisakan ruang kajian yang terbuka.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini berupaya menempatkan ulama sebagai fokus utama analisis untuk menjelaskan bagaimana otoritas moral, jaringan sosial-keagamaan, dan simbol-simbol religius—khususnya konsep jihad dan Perang Sabil—digunakan sebagai sumber daya mobilisasi dalam Pemberontakan Petani Banten 1888. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan kondisi sosial-keagamaan masyarakat Banten sebelum 1888; (2) menganalisis posisi dan otoritas ulama dalam struktur sosial masyarakat Banten; (3) mengkaji peran ulama dalam mobilisasi gerakan sosial keagamaan pada pemberontakan tersebut; dan (4) menjelaskan hubungan antara agama dan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang relasi antara otoritas keagamaan, struktur sosial, dan mobilisasi kolektif dalam sejarah perlawanan Islam di Indonesia.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*) dengan pendekatan sejarah sosial untuk mengkaji peran ulama dalam mobilisasi gerakan sosial keagamaan pada Pemberontakan Petani Banten 1888. Kajian difokuskan pada keterlibatan tokoh agama, seperti Haji Wasid, Haji Abdul Karim, Kiai Haji Tubagus Ismail, dan Haji Marjuki, khususnya di wilayah Cilegon dan sekitarnya pada periode 1880–1888. Analisis menggunakan perspektif sosiologi agama dan teori gerakan sosial untuk memahami hubungan antara otoritas keagamaan, kondisi sosial masyarakat, dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Penelitian mengikuti empat tahapan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018).

Pengumpulan sumber dilakukan melalui studi pustaka dan penelusuran dokumen sejarah yang berkaitan dengan Pemberontakan Petani Banten 1888. Rujukan utama penelitian adalah karya Sartono Kartodirdjo (1984), Pemberontakan Petani Banten 1888, yang membahas kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan masyarakat Banten. Literatur pendukung meliputi kajian Azra (2013) tentang jaringan ulama Nusantara dan Bruinessen (1999) mengenai pesantren serta tarekat. Sumber-sumber tersebut ditelaah melalui kritik ekstern untuk memeriksa asal-usul dan keaslian dokumen, serta kritik intern untuk menilai isi dan membandingkan informasi antarsumber.

Analisis dilakukan melalui tahap interpretasi dengan menghubungkan fakta sejarah dan teori mobilisasi gerakan sosial, terutama pemikiran Tarrow (2011) dan Tilly dkk. (2019). Analisis diarahkan pada peran ulama dalam membangun solidaritas, memanfaatkan jaringan pesantren dan tarekat, serta memberikan legitimasi keagamaan terhadap perlawanan masyarakat. Hasil analisis kemudian disusun melalui tahap historiografi dalam bentuk uraian sejarah yang kronologis dan analitis untuk menjelaskan hubungan antara otoritas ulama dan mobilisasi masyarakat dalam Pemberontakan Petani Banten 1888.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reinterpretasi Pemberontakan Banten 1888: Dari Deprivasi Ekonomi ke Mobilisasi Berbasis Otoritas

Pemberontakan Petani Banten 1888 tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari tekanan ekonomi dan kebijakan kolonial. Melalui teori *contentious politics* yang dikembangkan Tilly dkk. (2019) dan Tarrow (2011), peristiwa ini dapat dilihat dari beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu ketidakpuasan masyarakat akibat tekanan pajak, perubahan kedudukan elite tradisional, keberadaan jaringan pesantren dan tarekat, serta kemampuan ulama dalam menggerakkan masyarakat. Tekanan yang dialami petani memang menjadi salah satu penyebab munculnya

perlawanan, tetapi tidak dengan sendirinya menghasilkan gerakan yang terorganisasi. McCarthy dan Zald (2012), melalui teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*), menjelaskan bahwa gerakan sosial juga membutuhkan kepemimpinan, jaringan, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Pemberontakan Banten 1888, ulama memiliki kedudukan penting karena mampu memanfaatkan hubungan keagamaan yang telah terbentuk di tengah masyarakat.

Peran ulama menjadi penting ketika keresahan masyarakat mulai berkembang menjadi gerakan perlawanan. Kartodirdjo (1984) menjelaskan bahwa tekanan ekonomi, perubahan sosial, dan kebijakan pemerintah kolonial menjadi bagian dari latar belakang pemberontakan. Namun, kondisi tersebut perlu dilihat bersama dengan keberadaan tokoh yang mampu menghimpun masyarakat. Kuswana dkk. (2025), dalam kajian mengenai gerakan sosial keagamaan di Indonesia pascareformasi, juga menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat berkaitan dengan munculnya gerakan sosial, tetapi proses mobilisasinya tetap dipengaruhi oleh peluang politik dan kekuatan organisasi. Meskipun berlangsung dalam konteks sejarah yang berbeda, kajian tersebut membantu menjelaskan bahwa tekanan sosial saja belum cukup untuk membentuk perlawanan bersama. Dalam kasus Banten, ulama berperan menghubungkan keresahan petani dengan jaringan keagamaan yang dapat menggerakkan masyarakat.

Hubungan antara ulama dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam proses mobilisasi tersebut. Melalui pesantren dan tarekat, ulama memiliki jaringan yang dibangun atas dasar kepercayaan, kedekatan sosial, dan ikatan keagamaan. Hubungan antara kiai dan santri memungkinkan penyampaian informasi serta ajakan untuk melakukan perlawanan melalui jaringan yang sudah dikenal masyarakat. Kepercayaan terhadap ulama juga memberikan dasar keagamaan bagi masyarakat dalam memahami perjuangan melawan pemerintah kolonial. Berbeda dengan pemerintah kolonial yang menjalankan kekuasaan melalui birokrasi dan aturan administratif, ulama memiliki pengaruh yang

lebih dekat dengan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Dengan demikian, peran ulama dalam Pemberontakan Banten 1888 tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan agama, tetapi juga dengan kemampuan menghubungkan ketidakpuasan masyarakat, jaringan sosial, dan keyakinan keagamaan menjadi gerakan perlawanan bersama.

Validasi Lintas-Kasus: Tarekat sebagai Struktur Organisasi Gerakan

Peran jaringan keagamaan dalam Pemberontakan Petani Banten 1888 juga dibahas oleh Hamidah (2017) melalui kajiannya tentang sufisme dan gerakan perlawanan masyarakat Banten. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tarekat yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada kegiatan spiritual mulai terlibat dalam persoalan sosial dan politik, termasuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Pengaruh tarekat tidak hanya terbatas pada lingkungan pesantren dan masyarakat desa, tetapi juga menjangkau sejumlah pegawai pemerintahan dan aparat kepolisian. Keadaan ini memperlihatkan bahwa jaringan tarekat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Banten.

Temuan Hamidah melengkapi pembahasan mengenai peran ulama dalam menggerakkan pemberontakan. Ulama memiliki pengaruh karena kedudukan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat, sedangkan tarekat menyediakan jaringan yang menghubungkan para pengikutnya di berbagai wilayah. Hubungan tersebut memudahkan penyampaian informasi, pengorganisasian pertemuan, dan penyebaran ajakan untuk melakukan perlawanan. Haji Wasid, misalnya, memanfaatkan hubungan antartokoh agama dan jaringan pengajian untuk menghimpun dukungan masyarakat. Hamidah (2017) juga menjelaskan adanya penolakan terhadap kekuasaan asing yang disertai seruan perang suci. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat Banten tidak hanya dilatarbelakangi tekanan ekonomi dan kebijakan kolonial, tetapi juga berkaitan dengan keyakinan agama dan pandangan terhadap kekuasaan asing.

Hubungan antara agama dan perlawanan terhadap kolonialisme juga ditemukan dalam penelitian Thohir dkk. (2021) mengenai perubahan

ideologi keislaman masyarakat Jawa pada masa kolonial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa gerakan keagamaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan keyakinan, tetapi juga dengan pengaruh tokoh agama, hubungan sosial, dan perebutan otoritas di tengah masyarakat. Meskipun membahas periode yang berbeda, penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa agama dapat menjadi dasar pembentukan solidaritas dalam menghadapi tekanan politik. Dalam konteks Pemberontakan Banten 1888, hal ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan ulama dalam menghimpun masyarakat tidak dapat dipisahkan dari jaringan tarekat dan hubungan keagamaan yang telah terbentuk sebelumnya.

Otoritas Ganda Ulama-Haji: Antara Lokalitas dan Konektivitas Global

Aspek yang memerlukan elaborasi lebih jauh adalah fenomena otoritas ganda pada figur ulama-haji, yang menjadi salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini. Jika dibandingkan dengan kerangka jaringan ulama Nusantara yang dikembangkan Azra (Azra, 2013), tampak bahwa fenomena haji bukan sekadar ritual keagamaan personal, melainkan mekanisme akumulasi modal simbolik yang memperkuat posisi sosial-politik ulama di tingkat lokal. Ulama yang telah menjalankan haji memperoleh apa yang dapat disebut sebagai "legitimasi berlapis"—legitimasi lokal yang bersumber dari penguasaan ilmu agama dan kedekatan dengan masyarakat, ditambah legitimasi translokal yang bersumber dari konektivitasnya dengan pusat keilmuan Islam di Mekkah dan Madinah.

Signifikansi teoretis dari temuan ini terletak pada implikasinya terhadap pemahaman kita tentang bagaimana gerakan-gerakan lokal di Nusantara mampu mengakses kerangka ideologis transnasional. Ulama-haji Banten tidak menciptakan gagasan jihad dan Perang Sabil dari ruang kosong, melainkan mewarisi dan mengadaptasi diskursus keagamaan yang lebih luas yang bersirkulasi dalam jaringan intelektual Islam global, sebagaimana ditunjukkan Azra (Azra, 2013). Dengan demikian, Pemberontakan Banten 1888 perlu dipahami bukan sebagai peristiwa yang sepenuhnya lokal-tertutup, melainkan sebagai titik temu antara

dinamika lokal Banten dan arus pemikiran Islam yang lebih luas. Hal ini memperkaya pemahaman atas peristiwa tersebut, yang dalam kajian-kajian terdahulu sering diposisikan terlalu lokal tanpa mempertimbangkan dimensi konektivitas globalnya secara memadai.

Sacred Canopy dan Konversi Penderitaan Material menjadi Makna Spiritual

Agama memiliki peran penting dalam memberikan dasar pembenaran dan makna bagi perlawanan masyarakat Banten terhadap pemerintah kolonial. Peran ini dapat dipahami melalui konsep *sacred canopy* yang dikemukakan Berger (1967), yaitu pandangan bahwa agama dapat memberikan makna dan dasar moral bagi tindakan manusia. Dalam Pemberontakan Banten 1888, ulama tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menghubungkan penderitaan masyarakat dengan kewajiban untuk melawan ketidakadilan. Tekanan pajak, kerja wajib, dan pengawasan pemerintah kolonial dipahami sebagai bentuk penindasan yang perlu dilawan. Melalui seruan jihad dan Perang Sabil, perlawanan tersebut memperoleh makna keagamaan yang dapat mendorong masyarakat untuk ikut bergerak. Hal ini sejalan dengan pembahasan Snow dan Beyerlein (2018) mengenai peran agama dalam membentuk pemahaman bersama yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam gerakan sosial.

Pemaknaan keagamaan tersebut membantu menjelaskan mengapa sebagian masyarakat tetap bersedia melakukan perlawanan meskipun menghadapi kekuatan kolonial yang lebih besar. Bagi masyarakat yang menerima seruan ulama, perjuangan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi atau politik, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari kewajiban agama. Keyakinan tersebut dapat memberikan keberanian dan memperkuat solidaritas di antara para pengikut gerakan. Namun, tidak berarti seluruh peserta pemberontakan memiliki alasan yang sama. Tekanan ekonomi, hubungan sosial, dan kepercayaan terhadap pemimpin agama juga perlu diperhatikan. Dalam hal ini, ulama berperan menghubungkan berbagai keresahan masyarakat dengan ajaran

keagamaan sehingga perlawanan memperoleh tujuan dan makna yang dipahami bersama.

Peran agama dalam membentuk pemahaman bersama juga mendapat perhatian dalam kajian Watts dan Wilkins-Laflamme (2026), yang mengembangkan kembali konsep *sacred canopy* untuk menjelaskan keberadaan tatanan nilai bersama dalam masyarakat sekuler modern. Meskipun membahas konteks yang berbeda, kajian tersebut memperlihatkan pentingnya kerangka nilai dalam memberikan arah bagi kehidupan sosial. Dalam kasus Banten 1888, pengaruh agama terlihat melalui hubungan antara ulama, jaringan tarekat, dan masyarakat. Hamidah (2017) menjelaskan bahwa jaringan tarekat memiliki pengaruh luas dalam kehidupan sosial Banten, termasuk hubungannya dengan sebagian aparat pemerintahan kolonial. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengaruh keagamaan tidak terbatas pada kegiatan ibadah, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial dan sikap masyarakat terhadap kekuasaan. Dengan demikian, keterlibatan ulama dalam pemberontakan dapat dipahami melalui kemampuan mereka memberikan makna keagamaan terhadap perlawanan sekaligus memanfaatkan jaringan sosial yang telah terbentuk di tengah masyarakat.

Tipologi Gerakan: Antara Resistensi dan Milenarianisme

Pemberontakan Petani Banten 1888 tidak hanya merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah kolonial, tetapi juga memiliki corak milenarian, sebagaimana dijelaskan Kartodirdjo (1984). Corak ini berkaitan dengan harapan masyarakat akan datangnya perubahan besar yang didasarkan pada keyakinan agama. Dengan demikian, pemberontakan tidak hanya bertujuan menentang kebijakan kolonial yang merugikan masyarakat, tetapi juga dilandasi harapan terhadap kehidupan yang lebih baik. Perpaduan antara tekanan sosial-ekonomi dan keyakinan keagamaan menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam gerakan tersebut. Bagi sebagian pengikutnya, perlawanan bukan sekadar usaha memperbaiki keadaan, tetapi juga dipahami sebagai perjuangan yang memiliki makna keagamaan.

Dalam perspektif teori mobilisasi sumber daya yang dikembangkan McCarthy dan Zald (2012), keyakinan keagamaan dapat dipahami sebagai salah satu unsur yang mendukung terbentuknya solidaritas dalam gerakan sosial. Harapan akan perubahan dan kepercayaan terhadap pemimpin agama membantu memperkuat hubungan antaranggota serta mempertahankan semangat perlawanan di tengah tekanan pemerintah kolonial. Meskipun Pemberontakan Banten 1888 akhirnya dapat dipadamkan oleh pemerintah Belanda, peristiwa tersebut tetap menjadi bagian penting dalam sejarah perlawanan masyarakat Banten. Penelitian Kuswana dkk. (2025) mengenai gerakan sosial keagamaan di Indonesia juga menunjukkan bahwa identitas dan keyakinan agama dapat berperan dalam membangun solidaritas kelompok. Namun, perbedaan konteks sejarah perlu diperhatikan sehingga pengalaman gerakan kontemporer tidak langsung disamakan dengan pemberontakan pada masa kolonial.

Implikasi Teoretis: Ulama sebagai Mediator Struktural

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ulama dalam Pemberontakan Banten 1888 berperan sebagai mediator struktural yang menghubungkan tekanan pemerintah kolonial, jaringan sosial keagamaan, dan keyakinan masyarakat dalam melakukan perlawanan. Tekanan ekonomi dan politik kolonial menimbulkan keresahan di kalangan petani, tetapi keresahan tersebut memerlukan kepemimpinan dan jaringan sosial agar dapat berkembang menjadi gerakan bersama. Melalui pesantren dan tarekat, sebagaimana dijelaskan Hamidah (2017), ulama memiliki hubungan yang luas dengan masyarakat sehingga mampu menyampaikan gagasan dan menghimpun dukungan. Sementara itu, seruan jihad dan Perang Sabil memberikan dasar keagamaan yang memperkuat semangat perlawanan. Dengan demikian, peran ulama tidak hanya terbatas pada kepemimpinan agama, tetapi juga mencakup kemampuan menghubungkan berbagai kepentingan dan keresahan masyarakat menjadi gerakan kolektif yang terorganisasi.

Proposisi ini memberikan kontribusi pada perdebatan teoretis yang lebih luas mengenai relasi agama dan gerakan sosial, khususnya dengan menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tradisional yang dalam

beberapa kerangka modernisasi sering dipandang sebagai kekuatan konservatif atau pasif justru dapat berfungsi sebagai kekuatan transformatif yang aktif mengorganisasi resistensi terhadap kekuasaan yang menindas. Temuan ini sejalan dengan observasi Snow dan Beyerlein (2018) bahwa kajian gerakan sosial arus utama secara historis kurang memberi perhatian pada peran agama dan spiritualitas sebagai sumber daya mobilisasi, padahal institusi keagamaan kerap menjadi salah satu struktur mobilisasi paling efektif dalam masyarakat tradisional. Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai Pemberontakan Petani Banten 1888, tetapi juga menunjukkan pentingnya peran ulama dalam menggerakkan perlawanan masyarakat. Hubungan antara otoritas keagamaan dan gerakan sosial juga dapat ditemukan dalam berbagai peristiwa sejarah Islam di Indonesia. Penelitian Thohir dkk. (2021) dan Kuswana dkk. (2025) memperlihatkan bahwa tokoh agama, jaringan sosial, dan keyakinan keagamaan memiliki peran dalam membangun solidaritas serta mendorong tindakan kolektif. Meskipun berlangsung dalam kondisi sejarah yang berbeda, kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa agama tetap menjadi salah satu unsur penting dalam memahami gerakan sosial dan politik masyarakat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Pemberontakan Petani Banten 1888 tidak dapat dipahami secara memadai apabila hanya dibaca sebagai ledakan kemarahan sosial akibat tekanan ekonomi dan politik kolonial, melainkan harus dimaknai sebagai gerakan sosial keagamaan yang lahir dari konvergensi antara tekanan struktural, kekosongan otoritas elite tradisional, dan kapasitas mobilisasi yang dimiliki oleh ulama. Posisi ulama dalam struktur sosial Banten yang bertumpu pada penguasaan ilmu agama, jaringan pesantren dan tarekat, serta legitimasi berlapis sebagai ulama-haji yang menjadikan mereka bukan sekadar simbol religius pemberontakan, tetapi mediator struktural yang menjembatani keresahan material masyarakat dengan kerangka ideologis keagamaan. Melalui pembingkaian perlawanan dalam konsep jihad dan Perang Sabil, ulama berhasil mentransformasikan kalkulasi risiko rasional masyarakat

petani, sehingga tindakan kolektif yang secara material sangat berisiko tetap memperoleh legitimasi dan partisipasi yang luas. Dengan demikian, penelitian ini menjawab tujuan yang telah ditetapkan sejak awal: bahwa kondisi sosial-keagamaan, otoritas ulama, mekanisme mobilisasi, dan fungsi legitimasi agama bukanlah empat aspek yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan proses yang saling menopang dalam membentuk gerakan perlawanan terhadap kolonialisme.

Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai relasi antara otoritas keagamaan tradisional dan dinamika perubahan sosial-politik, dengan menunjukkan bahwa kekuatan keagamaan yang sering dipandang konservatif justru dapat berfungsi sebagai energi transformatif yang aktif mengorganisasi resistensi terhadap kekuasaan yang menindas. Untuk penelitian selanjutnya, kajian dapat diperluas dengan menelusuri arsip kolonial Belanda secara lebih mendalam guna memperkaya data primer mengenai jaringan ulama lintas-wilayah, maupun dengan melakukan studi komparatif terhadap gerakan-gerakan sosial keagamaan serupa di kawasan lain di Indonesia untuk menguji konsistensi pola mediasi struktural yang ditemukan dalam penelitian ini. Secara praktis, temuan ini juga relevan untuk memahami bahwa institusi keagamaan dan figur otoritatifnya tetap memiliki daya mobilisasi sosial yang signifikan hingga konteks kontemporer, sehingga pemahaman terhadap mekanisme tersebut penting bagi siapa pun yang berkepentingan dalam dialog antara agama, masyarakat sipil, dan kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, A. (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia* (1 ed.). Kencana.

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Knopf Doubleday Publishing Group.

Hamidah, H. (2017). Gerakan Petani Banten: Studi Tentang Konfigurasi Sufisme Awal Abad XIX. *Ulumuna*, *14*(2), 323–340. https://doi.org/10.20414/ujis.v14i2.220

Kartodirdjo, S. (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Pustaka Jaya.

Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah* (1 ed.). Penerbit Tiara Wacana.

Kuswana, D., Sumpena, D., & Hendra Hardiyan Syah, Y. (2025). Religion and Social Movements in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, *14*(2), 351–380. https://doi.org/10.18326/ijims.v14i2.351-380

McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (2012). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, *82*(6), 1212–1241. https://www.jstor.org/stable/2777934

Snow, D. A., & Beyerlein, K. (2018). Bringing the Study of Religion and Social Movements Together. In *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements* (hal. 571–585). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119168577.ch32

Tarrow, S. G. (2011). *Power in Movement* (3 ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511973529

Thohir, A., Supriadi, D., Mulyana, Arifin, F., & Septiadi, M. A. (2021). The Struggle of Freemasonry and Islamic Ideology in the Twentieth Century During Colonialization in Indonesia. *Heliyon*, *7*(10), e08237. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08237

Tilly, C., Castañeda, E., & Wood, L. J. (2019). *Social Movements, 1768–2018* (4 ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429297632

van Bruinessen, M. (1999). *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.

Watts, G., & Wilkins-Laflamme, S. (2026). The Secular Sacred Canopy: A Paradigm Revision in the Study of Secularization. *Sociological Theory*, *44*(3), 249–274. https://doi.org/10.1177/07352751261427015